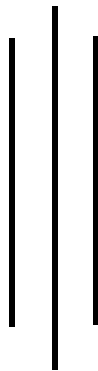




**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEMATANGSIANTAR**



**PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR TAHUN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan BerkatNya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Dokumen Rancangan Akhir RENJA tahun anggaran 2025 sistematika penulisan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan dan anggaran selama satu tahun. Selain itu dokumen Rancangan Akhir Renja juga memuat informasi tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pelaksanaan renja tahun berjalan, serta informasi tentang analisis kinerja pelayanan sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renja tahun 2025 masih terdapat kekurangan, Oleh karena itu kami harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar yang telah disusun ini dapat memberikan informasi serta manfaat bagi Kota Pematang Siantar serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan dan anggaran.

Pematang Siantar, Juli 2024



KEPALA DINAS KEPENDUDUK DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA P.SIANTAR

**SM.ULINASARI GIRSANG,**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651217 199311 2 001

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renja	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4. Riview Terhadap Rancangan Akhir RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	36
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting	53
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	53
5.3 Rencana Tindak Lanjut	53

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1. Program,Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023	8
Tabel 2.2 Keadaan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar TA. 2023	10
Tabel 2.3 Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023	11
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pematangsiantar	15
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar	20
Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 Kota Pematangsiantar	25
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (sesuai Renstra)	41
Tabel T-C 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pematangsiantar	45
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025	51



**PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Telp (0622) 25300

**PEMATANG SIANTAR**

Email: [dukcapilpematangsiantar1@gmail.com](mailto:dukcapilpematangsiantar1@gmail.com) Website : [dukcapil.pematangsiantar.go.id](http://dukcapil.pematangsiantar.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR : 015.400.12/ 2018/ II/ 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN  
ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KOTA PEMATANGSIANTAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan Program, Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025. Perlu pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pendoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019-2023
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
22. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2025, dengan Susunan Personalianya Sebagaimanan tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini Mempunyai Tugas
- a. Mengkordinasikan dan Menyusun Rencaa Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
  - b. Mengumpulkan data, menyusun serta mensinkronkan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025;
  - c. Menilai dan menganalisa program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025);

- d. Menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2025;
- e. Dan lain-lain Untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025;

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal, 02 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR



SMULIN NASARI GIRSANG,SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 199311 2 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 015.400.12/ 2018/ II/ 2024  
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2024  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
(RENJA) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
5.	Kepala Bidang PIAK	Anggota
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
8.	Kasubbag Keuangan	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Operator SIPD	Anggota



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA PEMATANGSIANTAR

**SMULINASARI GIRSANG,SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651217 199311 2 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Pematangsiantar.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Pematang Siantar Tahun 2025 dan Renstra Kota Pematang Siantar Tahun 2022 – 2027 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2025.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung rencana program pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mempedomani sebagaimana penjelasan di atas, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025 ini akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD Kota Pematangsiantar dan akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang akan dianggarkan pada RAPBD Kota Pematangsiantar untuk setiap tahunnya.

## 1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025 disusun berdasarkan landasan hukum :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematang Siantar Tahun 2012-2032
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang tentang pembentukan perangkat daerah Kota Pematangsiantar.
12. Peraturan Daerah Kota Pematang siantar Nomor 7 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pematang siantar
13. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar
14. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Srategis Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### **2. Tujuan**

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025
- b) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025 yang akan dibiayai APBD Kota Pematangsiantar
- c) Menyediakan satu parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memahami arah dan tujuan yang hendak dicapai.
- e) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Pematangsiantar serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar pada tahun 2023 melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 29 sub kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Tabel Program,Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2023**

N O	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	
		<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
		1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
		2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.
		<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
		3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>



N O	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<b>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
		6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan Dinas Jabatan
		6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		6.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	
		<b>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>
		1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
		1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		<b>2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>
		2.1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
		2.2 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	
		<b>1. Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
		1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	
		<b>1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>

N O	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		1.1 Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
		1.2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
<b>5.</b>	<b>PENGELOLAHAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	
		<b>1. Penyusunan Profil Kependudukan</b>
		1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dibawah ini disajikan Keadaan Belanja pada Tahun 2023

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Belanja**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Pematangsiantar TA. 2023**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.974.984.949</b>
1.1	Belanja Pegawai	3.285.175.973
1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.689.808.976
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>477.966.020</b>
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.966.020
	<b>Jumlah</b>	<b>5.452.950.969</b>

Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sampai dengan TA. 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA. 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>4.774.549.150</b>	<b>4.700.933.871</b>	<b>98,46</b>	<b>APBD</b>
		<b>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.136.455</b>	<b>21.759.770</b>	<b>98,30</b>	<b>APBD</b>
		1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.200.000	4.000.000	<b>95,24</b>	APBD
		<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.207.895.973</b>	<b>3.203.657.329</b>	<b>99,87</b>	<b>APBD</b>
		2.1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN.	<b>3.207.895.973</b>	<b>3.203.657.329</b>	99,87	APBD
		<b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>396.032.355</b>	<b>386.980.486</b>	<b>97,71</b>	<b>APBD</b>
		3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.102.250	4.101.950	99,99	APBD
		3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.621.389	45.296.962	87,75	APBD
		3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.870.716	35.149.908	97,99	APBD
		3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konstulasi SKPD	304.438.000	302.431.666	99,34	
		<b>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>480.932.240</b>	<b>450.393.500</b>	<b>93,65</b>	<b>APBD</b>
		4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>480.932.240</b>	<b>450.393.500</b>	<b>93,65</b>	APBD
		<b>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>449.634.832</b>	<b>423.633.717</b>	<b>94,22</b>	<b>APBD</b>
		5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.268.800	4.268.800	100,00	APBD
		5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.239.104	78.050.221	88,45	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
		5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.126.928	341.314.696	95,57	APBD
		<b>6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.853.750</b>	<b>232.268.839</b>	<b>98,48</b>	<b>APBD</b>
		6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.970.000	35.866.599	97,02	APBD
		6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.850.000	21.157.240	91,29	APBD
		6.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	176.033.750	175.245.000	99,55	APBD
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>521.067.975</b>	<b>503.224.323</b>	<b>96,58</b>	<b>APBD</b>
		<b>1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>429.366.841</b>	<b>412.452.573</b>	<b>96,06</b>	<b>APBD</b>
		1.1 Pencatatan, penatausahaan dan penerbit dokumen atas Pendaftaran Penduduk	285.792.701	272.580.150	95,38	APBD
		1.2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	143.574.140	139.872.423	97,42	APBD
		<b>2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>91.701.134</b>	<b>90.771.750</b>	<b>98,99</b>	<b>APBD</b>
		2.1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	72.000.000	72.000.000	100,00	APBD
		2.3 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	19.701.134	18.771.750	95,28	APBD
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>66.474.668</b>	<b>62.840.831</b>	<b>94,53</b>	<b>APBD</b>
		<b>1. Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>66.474.668</b>	<b>62.840.831</b>	<b>94,53</b>	<b>APBD</b>
		1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	66.474.668	62.840.831	94,53	APBD

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SUMBER DANA
4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		43.038.996	39.380.310	91,50	APBD
		1. Penyusunan Profil Kependudukan	47.820.000	45.275.000	94,68	APBD
		1.1 Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan	35.388.996	31.730.310	89,66	APBD
		1.2 Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	7.650.000	7.650.000	100,00	APBD
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL PENDUDUK		47.820.000	45.275.000	94,68	APBD
		1. Penyusunan Profil Kependudukan	47.820.000	45.275.000	94,68	APBD
		1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lainnya	47.820.000	45.275.000	94,68	APBD

Dari hasil evaluasi terhadap table diatas dapat dijelaskan bahwa Total Anggaran Dias Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah Rp. **5.452.950.789** Realisasi anggaran sampai dengan ahir tahun anggaran adalah **Rp. 5.351.654.335** atau sebesar **98,14 %** dari Total Anggaran, dengan Sisa Anggaran sebesar Rp 101.296.454 atau sebesar 1,86 dari total anggaran . Sisa anggaran itu dikarenakan :

- Selisih harga antara pagu anggaran dengan harga pasar, serta selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak.
- Efisiensi biaya dan belanja yang menyesuaikan pada kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Sisa lebih atas biaya rutin kantor (air ,Listrik, dll)

Capaian realisasi keuangan ini dikategorikan Baik dan diatas rata -rata dikarenakan penganggaran sudah berdasarkan pada efektivitas dan efisiensi pada program dan kegiatan .

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja OPD dan pencapaian Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam **tabel T-C.29**.



**Tabel T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Pematangsiantar**  
**Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022-2027	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	B		B	CC		B		
		Nilai IKM pelayanan Perangkat Daerah	405		85	77,86	91,6%	85	176,6	43%
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	500%		100%	100%	100%	100%	200%	40%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	10 Dokumen	-	2	2	1,00	2	4	0,40

	Perencanaan Perangkat Daerah									
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Adminsitrase Keuangan</b>	<b>500%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang		34	34	1,00	34	34	1,00
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>500%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4	4	1,00	4	4	1,00
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4	4	1,00	4	4	1,00
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4	4	1,00	4	4	1,00
2.12.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan		40	40	1,00		40	1,54
<b>2.12.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>500%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Jenis		22	22	1,00		22	3,67
<b>2.12.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>



2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		12	12	1,00	12	24	0,40
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4	4	1,00	4	8	2,00
2.12.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12	12	1,00	12	24	0,40
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	200%	40%
<b>2.12.01.2.09.01</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3	3	1,00	3	3	1,00
<b>2.12.01.2.09.06</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20	20	1,00	20	20	1,00
<b>2.12.01.2.09.09</b>	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	1	1	1,00	-	1	1,00
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Cakupan Dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)</b>	<b>470%</b>		<b>85%</b>	<b>121,65%</b>	<b>143%</b>	<b>90 %</b>	<b>211,65%</b>	<b>45,03%</b>
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen Pendaftaran</b>	<b>500%</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>

		<b>Penduduk yang terlayani</b>								
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelapor Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbit Dokumen Atas Pelapor Peristiwa Penting	47.160 Dokumen		38.800	38.800	1,00			2
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60 Laporan	-	12	12	1,00	12	24	0,41
<b>2.12.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>60 Laporan</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>	<b>40%</b>
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5.000 Dokumen		1.000	1.000	1,00	1.000	2.000	0,40
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan		1	1	1,00	1	2	0,40
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Akta Kematian + Persentase Akte Perceraian)</b>								
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Terlayani</b>								
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil Yang Ditingkatkan	1 Layanan		1	1	1,00	1	1	1,00

<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan</b>	<b>500</b>							
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian DataBase Kependudukan</b>	<b>Capaian Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian DataBase Kependudukan</b>	<b>500 %</b>							
2.12.04.2.01.01	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 Dokumen		24	13	0,54	24	37	1,54
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen		5	4	0,80	5	9	0,41
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan</b>								
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Kependudukan</b>								
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan serta Kebutuhan Lainnya	Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan serta Kebutuhan Lain yang tersusun	100 Dokumen/Buku		100	100	1,00	100	200	2,00

Beberapa kondisi yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Tahun 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

- Ada 1 ( satu ) indikator Program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu pada Program Penunjang dengan indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dengan dengan Nilai capaian “CC “ dikarenakan ada beberapa point yang harus dibenahi dalam implementasi SAKIP Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar diantaranya belum adanya Publikasi Perencanaan Kinerja pada web resmi Kota.
- Rendahnya capaian Nilai AKIP pada Tahun 2023 dapat membuat Target Kinerja Tahun 2024 menurun , melihat kondisi yang memerlukan perbaikan . Untuk membenahi capaian Nilai AKIP yang belum memenuhi target , diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian Indikator kinerja setiap program dan kegiatan dalam rangka memastikan Tujuan Kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik

Semua Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun Aggaran 2023 memenuhi Target Kinerja

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat kita lihat pada table berikut :

**Tabel T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar**

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(n-2) 2023	(n-1) 2024	(n) 2025	(n+1) 2026	(n-2) 2023	(n-1) 2024	n 2025	(n+1) 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatata Sipil			B (76,61)	B (77,61)	B (78,61)	B (79,61)	B (88,30 )	B (80)	B (80)	B (80)	
2	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil			98,78%	99,07	99,56%	100%	90,89	91,50 %	92,11%	92,72 %	

3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama			30%	45%	65%	70%	35%	45%	65%	70%	
4	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)			99,07%	99,36%	99,85%	100%	92,14 %	92,43 %	92,72%	93,01 %	
5	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)			92,46%	92,92%	93,38%	93,84%	94,51 %	94,97 %	95,43%	95,59 %	
6	Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase Pemanfaatan Profil Oleh Lembaga Pengguna			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 23 Thn 2006, PP Nomor 37 Th 2007 dan Perpres Nomor 25 Th 2008 serta PP Nomor 41 Th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:
  - a. Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK.
  - b. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
2. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi.
3. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.

4. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll)
6. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, wajib disiapkan: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, antara lain :

#### A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Landasan Hukum Kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022.
2. Landasan hukum penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota

Pematangsiantar.

#### B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan.
2. Belum memadainya sarana dan prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

#### C. Faktor Peluang Organisasi

1. Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016, Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.
2. Adanyamedia teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepadasetiapstakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan system informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

#### D. Faktor Tantangan Organisasi

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan.
2. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sulit, Mahal dan berbelit-belit.

#### 2.4 Review terhadap RKPD OPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju

Selanjutnya ketiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) OPD Kota Pematangsiantar berdasarkan RKPD Kota Pematangsiantar yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se Kota Pematangsiantar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kota Pematangsiantar.

Untuk membandingkan rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan tabel sebagai berikut :



**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025**  
**Kota Pematangsiantar**

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pematangsiantar	<b>Capaian AKIP PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Nilai B</b>	<b>5.011.667.798</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Pematangsiantar	<b>Nilai Sakip Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai B</b>	<b>5.011.667.798</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.615.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.615.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.615.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.615.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.857.830.396</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>3.857.830.396</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>33 Orang</b>	<b>3.857.830.396</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<b>33 Orang</b>	<b>3.857.830.396</b>	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengelolaan</b>	<b>100%</b>	<b>319.410.000</b>	<b>Administrasi Umum</b>		<b>Capaian Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>319.410.000</b>	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Administrasi Umum</b>			<b>Perangkat Daerah</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Umum</b>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.410.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.410.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Laporan	200.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>			
	Penggandaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Capaian Penggandaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	10 Unit		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	250.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>506.692.402</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>506.692.402</b>	
	Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	4 laporan	8.698.579	Penyediaan Jasa surat menyurat		Jumlah laporan penyediaan surat menyurat	4 laporan	8.698.579	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.993.627	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.993.627	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	411.300.196	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	411.300.196	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3 Unit</b>	<b>70.820.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>70.820.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.820.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.820.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%		
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan	100%							

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Bangunan Lainnya Yang Dipelihara								
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		<b>Persentase Cakupan Kepemilikan dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)</b>	<b>100%</b>	<b>570.512.500</b>	<b>Persentase Cakupan Kepemilikan dokumen Kependudukan (Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)</b>		<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>100%</b>	<b>570.512.500</b>	
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Terlayani</b>	<b>42.777</b>	<b>427.187.500</b>	<b>Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Terlayani</b>		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>42.777</b>	<b>427.187.500</b>	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100%		
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	44.915 Dokumen	343.618.000	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk	44.915 Dokumen	343.618.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Capaian Peningkatan	12 Laporan	83.569.500	Capaian Peningkatan		Peningkatan Pelayanan	12 Laporan	83.569.500	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Pendaftaran Penduduk			
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>143.325.000</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>143.325.000</b>	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	1000 Dokumen	104.737.500	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	1000 Dokumen	104.737.500	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Capaian Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	38.587.500	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		Capaian Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	38.587.500	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase Cakupan</b>	<b>93.38%</b>	<b>86.708.500</b>			<b>Persentase Cakupan</b>	<b>93.38%</b>	<b>86.708.500</b>	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<b>Dokumen Pencatatan Sipil ( Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Dokumen Pencatatan Sipil ( Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian</b>			
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Terlayani</b>	<b>9.377%</b>	<b>51.623.000</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Terlayani</b>	<b>9.377%</b>	<b>51.623.000</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen hasilPencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.377 Dokumen	27.562.500	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		Jumlah Dokumen hasilPencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9.377 Dokumen	27.562.500	

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	24.060.500	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	24.060.500	
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>35.085.500</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL</b>		<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>35.085.500</b>	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		umlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	35.084.500	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		umlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	35.084.500	
<b>4.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase pemenuhan Permintaan data Kependudukann</b>	<b>100%</b>	<b>62.226.100</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase pemenuhan Permintaan data Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>62.226.100</b>	
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>62.226.100</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>		<b>Jumlah Laporan Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>62.226.100</b>	



No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 Dokumen	37.176.800	Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 Dokumen	37.176.800	
	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	25.049.300	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	25.049.300	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>45.904.500</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>45.904.500</b>	
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>		<b>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>45.904.500</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>		<b>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>45.904.500</b>	
	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	100 Dokumen	<b>45.904.500</b>	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	10.320922	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 untuk membahas program dan kegiatan yang dibutuhkan Tahun 2023 telah dilaksanakan. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin yang salah satu sasaran kegiatannya adalah kecamatan se- Kota Pematangsiantar, yaitu Program Pendaftaran Penduduk dan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2.4  
Usulan dan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan  
Tahun Anggaran 2025 Kota Pematangsiantar

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional dalam urusan administrasi kependudukan dituangkan dalam kebijakan Renstra Ditjenduk Capil tahun 2020-2024, dimana program prioritas presiden 2020-2024 tertuang dalam sasaran strategis kemendagri, Ada 5 program prioritas pembangunan nasional yaitu :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Reformasi Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Output sasaran Strategis Kemendagri dari Program tersebut :

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur/ Sarana Prasarana
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Reformasi Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi
- f. Pembinaan Stabilitas Politik Dalam Negeri
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa
- h. Pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan public
- i. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah
- j. Penataan wilayah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan output/sasaran strategis kemendagri tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mangacu pada sasaran point h yaitu pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik.

Penyelarasan program prioritas pemerintah kedalam rencana strategis DitjenDukcapil :

1. Pembangunan SDM : meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
2. Pembangunan infrastruktur : mewujudkan sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah
3. Penyederhanaan regulasi : terwujudnya regulasi menuju single identity number
4. Pemanfaatan data kependudukan : terwujudnya kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, berbasis digital dan tingkat kepuasan masyarakat yang memadai.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematangsiantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

## **“Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas”**

Yang dimaksudkan dengan :

1. **Sehat** : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.
2. **Sejahtera** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.
3. **Berkualitas** : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada

periode lalu. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematangsiantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematangsiantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi sebagai pendukung, penunjang terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yaitu sebagai Penyelenggaran Pelayanan Publik Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar, terutama pada **misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip *good governance* dan *coorporate governance***. Pada misi ini terdapat satu tujuan, yaitu mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk tujuan ini ada 3 sasaran yang ingin dicapai yaitu: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator kinerja : a. Indeks Kepuasan Masyarakat, b. Indeks SPBE; 2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja : a. Nilai SAKIP**, b. Indeks IPKD; 3. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja : Derajat Desentralisasi Fiskal.

Dari ketiga sasaran pada Tujuan Missi ke 3 RPJMD Kota Pematangsiantar di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mendukung sasaran Pertama dan kedua, Yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator a. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Sasaran Kedua **meningkatnya akuntabilitas kinerja** dengan indikator kinerja Nilai SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Pematangsiantar, memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota Padang yaitu: "MEWUJUDKAN KOTA PEMATANGSIANTAR YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar tahun 2022-2027.

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai institusi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, maka tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka menengah diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Tahun 2025 (sesuai Renstra)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2025	Program	Indikator Program
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	B (78,61)		
		Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata rata Cakupan kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Akta Capil	99,56%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan(Persentase Kepemilikan KTP + KK + KIA)

					Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil ( Persentase Akte Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)
			Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.	65%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemenuhan Permintaan data kependudukan.  Persentase Pemanfaatan Profil Oleh Lembaga Pengguna
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	B	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian AKIP Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1 Inovasi		

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan rencana kerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Visi dan Misi Kepala daerah Tahun 2025 meliputi 5 program, 23 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut :

#### **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

##### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

##### **3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

##### **4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

4.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

##### **5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

##### **6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**

### **1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

- 1.1 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi atas Pendaftaran Penduduk
- 1.2 Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- 1.3 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

### **2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

- 2.1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
- 2.2 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

## **PROGRAM PENCATATAN SIPIL**

### **1. Pelayanan Pencatatan Sipil**

- 1.1 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 1.2 Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

### **2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

- 2.1 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

## **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan**

- 1.1 Pengelolahaan dan Penyajiaan Data Kependudukan
- 1.2 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan

## **PROGRAM PENGELOLAHAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**

### **1. Penyusunan Profil Kependudukan**

- 1.1 Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Serta Kebutuhan Yang Lain

TABEL TC. 3.3  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
**PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA PEMATANG SIANTAR**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (N)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
-1	-2		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				5.777.019.398				5.761.562.753
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				5.777.019.398				
<b>2.12.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Akip Perangkat Daerah</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>B</b>	<b>5.011.667.798</b>				5.761.562.753
2.12.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disdukcapil	100%	6.615.000			100%	6.945.750
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disdukcapil	2 Dokumen	6.615.000	DAU APBD		2 Dokumen	6.945.750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	3.857.830.396			100%	3.762.951.275
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapi	34 Orang. 14 Bulan	3.857.830.396	DAU APBD		34 Orang. 14 Bulan	3.762.951.275
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Umum Perangkat Daerah	Disdukcapi	100%	319.410.000			100%	379.630.500
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Disdukcapi	4 Paket	4.410.000	DAU APBD		4 Paket	4.630.500
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disdukcapi	4 Paket	65.000.000	DAU APBD		4 Paket	70.000.000
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Disdukcapi	4 Paket	50.000.000	DAU APBD		4 Paket	55.000.000
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disdukcapi	26 Laporan	200.000.000	DAU APBD		26 Laporan	250.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	100%	250.000.000			100%	300.000.000
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Disdukcapil	10 Unit	250.000.000	DAU APBD		6 Unit	300.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah	Disdukcapil	100 %	506.992.402			100%	459.816.431
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disdukcapil	12 Laporan	8.698.579	DAU APBD		12 Laporan	9.933.508
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Disdukcapil	4 Laporan	86.993.627	DAU APBD		4 Laporan	91.343.308
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Disdukcapil	12 Laporan	411.300.196	DAU APBD		12 Laporan	358.539.615
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Disdukcapil	100 %	70.820.000			100%	75.820.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Disdukcapil	3 Unit	45.820.000	DAU APBD			45.820.000
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Disdukcapil	20 Unit	25.000.000	DAU APBD		20 Unit	30.000.000
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>% Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (% kepemilikan KTP + KK + KIA)</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>99,85%</b>	<b>570.512.500</b>	DAU APBD		<b>99,85%</b>	<b>579.611.306</b>
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Yang Terlayani	Disdukcapil	42.777 Dokumen	427.187.500	DAU APBD		47.180 Dokumen	434.120.056
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	44.915 Dokumen	343.618.000	DAU APBD		47.160 Dokumen	346.372.078
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	12 Laporan	83.569.500	DAU APBD		12 Laporan	87.747.978



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	12 Laporan	143.325.000			12 Laporan	145.491.250
2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1000 Dokumen	104.737.500	DAU APBD		1000 Dokumen	104.974.375
2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	1 Laporan	38.587.500	DAU APBD		1 Laporan	40.516.875
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil (Persentase Akta Kelahiran 0-18 + Persentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan + Persentase Akta Kematian + Persentase Akta Perceraian)</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>93,38 %</b>	<b>86.708.500</b>			<b>93,38 %</b>	<b>87.575.585</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil Yang Terlayani	Disdukcapil	9.377 Dokumen	51.623.000			10.377 Dokumen	52.469.955
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan atas pelaporan peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	9.377 Dokumen	27.562.500			10.337 Dokumen	27.629.355
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Disdukcapil	1 Layannan	24.060.500			1 Layanan	24.840.600
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Disdukcapil	1 Laporan	35.085.500			1 Laporan	35.105.630
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Disdukcapil	1 Laporan	35.085.500	DAU APBD		1 Laporan	35.105.630
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Permintaan Data Kependudukan</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>62.226.100</b>			<b>100%</b>	<b>62.848.361</b>
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan	Disdukcapil	12 Laporan	62.226.100			12 Laporan	62.848.361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.04.2.01.0001	Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Disdukcapil	24 Dokumen	37.176.800	DAU APBD		24 Dokumen	37.791.118
2.12.04.2.01.0002	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil	5 Dokumen/OPD	25.049.300	DAU APBD		4 Dokumen	25.057.243
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Profil Kependudukan</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>45.904.500</b>			<b>100%</b>	<b>46.363.545</b>
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	Disdukcapil	100 Dokumen	45.904.500			100 DOKUMEN	46.363.545
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Disdukcapil	100 DOKUMEN	45.904.500	DAU APBD		100 Dokumen	46.363.545

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan (RKPD) Kota Pematang Siantar Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dalam menyempurnakan Rencana (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2025

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk Tahun disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), dan usulan yang disampaikan Bidang-Bidang yang ada di Dinas, berikut ini kami sampaikan Program yang akan di laksanakan Tahun seperti :

1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

#### Pendanaan

Rencana Pendanaan untuk Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Berikut lampiran yang memuat Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel 4.1**

#### **Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Pendanaan pada Bappeda Kota Pematangsiantar Tahun 2025**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	4
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.777.019.398	
x	Xx	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.011.667.798	DAU
x	Xx	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.615.000	
x	Xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.615.000	
							DAU
x	Xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.857.830.396	DAU
x	Xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	3.857.830.396	DAU
x	Xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.410.000	

1					2	3	4
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.410.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	DAU
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	DAU
					Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	200.000.000	DAU
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	DAU
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.992.402	DAU
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.698.579	DAU
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	86.993.627	DAU
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.300.196	DAU
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.820.000	DAU
x	xx	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.820.000	DAU
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	DAU
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>570.512.500</b>	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	427.187.500	DAU
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	343.618.000	DAU
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	83.569.500	DAU
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	143.325.000	
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	104.737.500	DAU
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	38.587.500	DAU
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>86.708.500</b>	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	51.623.000	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa penting	27.562.500	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	24.060.500	DAU
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan SIPIL	35.085.500	
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	35.085.500	DAU
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>62.226.100</b>	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan data kependudukan	62.226.100	DAU
2	12	04	2.01	01	Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan	37.176.800	DAU
2	12	04	2.01	01	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	25.049.300	DAU

1					2	6	7
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>45.904.500</b>	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	45.904.500	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	45.904.500	DAU

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai tahun anggaran 2025.

Keberhasilan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta jajarannya saja, tetapi juga sangat ditentukan oleh dukungan dari lintas sektoral, lintas OPD, Kecamatan, Kelurahan, termasuk masyarakat dengan segala elemen yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang sama dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang optimal serta database kependudukan yang akurat.

#### **1.2 Kaidah Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah – kaidah pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengacu pada alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan serta penyediaan pagu APBD.

#### **1.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.

Pematang Siantar, Juli 2024

**Kepala dinas kependudukan dan pencatatan  
Sipil Kota Pematang Siantar,**



**SM.ULINASARI GIRSANG,SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19651217 199311 2 001**